

## Pengentasan *Digital Divide* dalam Penerapan *E-Government* di Kabupaten Sumbawa

Author:

Muhamad Dimas<sup>1\*</sup>, Mohammad Rezza Fahlevvi<sup>2</sup>

Affiliation:

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, Jl. Garuda No. 1, Sumbawa,  
Indonesia<sup>1</sup>

Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Ir. Soekarno Km. 20.  
Jatinangor, Indonesia<sup>2</sup>

e-Mail: [dimaszc11@gmail.com](mailto:dimaszc11@gmail.com)<sup>1</sup>, [rezza@ipdn.ac.id](mailto:rezza@ipdn.ac.id)<sup>2</sup>

\*Correspondence Author



Received, 11 November 2024

Revised, 20 Desember 2024

Accepted, 20 Desember 2024

Available Online, 24 Desember 2024

### Abstrak

Pemerintahan mengalami perkembangan yang pesat dalam bidang teknologi untuk mempermudah penyebaran informasi kepada masyarakat melalui media digital. Teknologi digunakan oleh pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui implementasi *E-Government*. Namun, adanya digitalisasi yang digunakan pemerintah menemui hambatan dimana dalam masyarakat masih banyak yang mengalami *digital divide* terutama bagi masyarakat yang tinggal di wilayah pedesaan. Hal ini menjadi tantangan bagi Pemerintah agar persebaran informasi dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di Kabupaten Sumbawa. Penelitian ini menganalisis tipe *digital divide* yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Sumbawa dengan menggunakan dimensi *digital divide* dari Szilard Molnar yang terdiri dari kesenjangan akses, kesenjangan penggunaan, serta kualitas dari penggunaan. Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi bagaimana masyarakat menggunakan teknologi informasi dan hambatan apa yang dialami masyarakat selama menggunakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan tujuan agar data yang diperoleh dapat ditelusuri lebih dalam. Informan berasal dari beberapa bidang di Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Sumbawa, dan masyarakat desa yang terdampak *digital divide*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dari dimensi *digital divide* yang digagas oleh Molnar diperoleh data bahwa masyarakat pedesaan cenderung mengalami *access divide* yang disebabkan oleh persebaran jaringan yang tidak merata, masyarakat mengalami masalah pada *usage divide* dikarenakan keterbatasan masyarakat dalam memiliki perangkat elektronik, masyarakat juga terkendala keterbatasan *skill* atau kemampuan dalam menggunakan perangkat elektronik sehingga tidak dapat memaksimalkan manfaat yang di dapat dari penggunaan perangkat elektronik. Dari beberapa kendala diatas, pemerintah memiliki peran dalam mengentaskan *digital divide* agar *E-Government* dapat berjalan dengan baik.

**Kata kunci:** *Digital Divide*, *E-Government*, Masyarakat Desa.

### **Abstract**

*The government is experiencing rapid developments in the field of technology to facilitate the dissemination of information to the public through digital media. Technology is used by the Sumbawa Regency government through the implementation of E-Government. However, the digitalization used by the government has encountered obstacles where many people still experience the digital divide, especially people who live in rural areas. This is a challenge for the Government so that the dissemination of information can be felt by all people in Sumbawa Regency. This research analyzes the type of digital divide experienced by the people of Sumbawa Regency using Szilard Molnar's digital divide dimensions which consist of access gaps, usage gaps, and quality of usage. This research tries to identify how people use information technology and what obstacles people experience when using it. The research method used is qualitative with the aim that the data obtained can be explored more deeply. Informants came from several fields in the Sumbawa Regency Information, Statistics and Encryption Communication Service, and village communities affected by the digital divide. The results of this research show that from the digital divide dimension initiated by Molnar, data is obtained that rural communities tend to experience access divides caused by uneven network distribution, communities experience problems with usage divides due to people's limitations in owning electronic devices, communities are also constrained by limitations. skill or ability in using electronic devices so that they cannot maximize the benefits obtained from using electronic devices. Based on the obstacles above, the government has a role in alleviating the digital divide so that E-Government can run well.*

**Keywords:** Digital Divide, E-Government, Village Community.

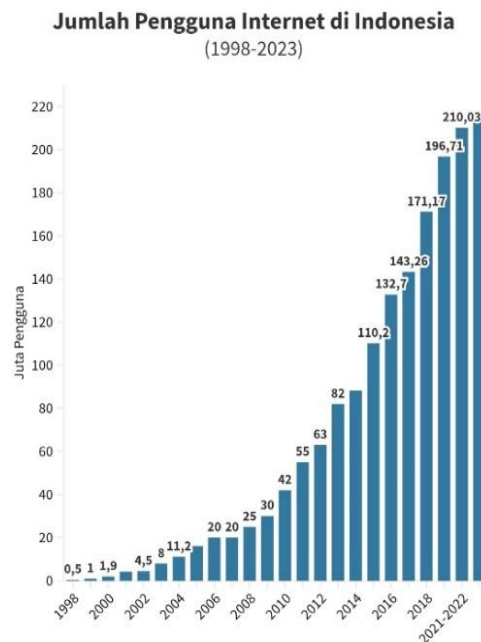
## **1. Pendahuluan**

Dewasa ini pemerintahan sudah mengalami perkembangan yang pesat terkhusus di dalam bidang teknologi yang mana teknologi sendiri merupakan alat yang digunakan untuk menunjang kebutuhan manusia. Salah satu teknologi yang mempengaruhi kehidupan manusia saat ini yaitu teknologi informasi dan komunikasi (TIK). TIK cukup membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan pada saat ini karena pada era sekarang pemerintahan mulai dijalankan dalam basis website (Nainggolan, 2024) dan juga aplikasi sehingga memudahkan pekerjaan pemerintah dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat, dengan adanya TIK juga membuat kinerja pemerintahan menjadi semakin baik, cepat, dan efisien. TIK tentunya tidak lepas dari peranan internet yang menghubungkan seluruh perangkat teknologi yang digunakan oleh masyarakat.

Selain memudahkan pekerjaan, internet juga menciptakan suatu keadaan sosial dimana interaksi yang terjadi dapat dilakukan tanpa mengenal jarak dan juga waktu. Akibatnya batas batas sosial budaya yang ada sudah tidak lagi ada dan bisa

beralkulturasi dengan baik terutama berkat bantuan internet (Istiani, 2020). Penelitian ini memperkuat argumen dengan merujuk pada teori dan konsep global terkait digital divide. Salah satu pendekatan yang relevan adalah gagasan menurut (Van Dijk, 2006) yang menjelaskan evolusi digital divide, yang tidak hanya mencakup kesenjangan akses tetapi juga ketidaksetaraan keterampilan dan penggunaan teknologi (sebagaimana dikutip dalam (Oktavianoor, 2020)). Selain itu, konsep masyarakat jaringan (*network society*) yang dikemukakan oleh (Sam, 2019) memberikan kerangka teoretis untuk memahami peran teknologi komunikasi dalam mendorong transformasi sosial dan pemerintahan berbasis digital. Penelitian ini juga mengacu pada studi oleh (Kim dkk., 2018) yang membandingkan digital divide dalam konteks global, menyoroti tantangan yang dihadapi masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang (sebagaimana dikutip dalam (Reisdorf, 2024)).

Dengan merujuk pada laporan (OECD, 2001) serta data dari lembaga internasional seperti *International Telecommunication Union (ITU)*, penelitian ini mengaitkan temuan lokal di Kabupaten Sumbawa dengan tren dan tantangan yang lebih luas, sehingga memperkaya analisis dengan perspektif global dan meningkatkan kontribusinya pada komunitas akademik kajian media.



Sumber: Waluyaningtyas, D. P., & Laksana, D. H. (2023)

**Gambar 1. Jumlah pengguna internet di Indonesia 1998-2023**

Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memegang peranan krusial dalam negara kepulauan seperti Indonesia, yang memiliki lebih dari 17.000 pulau dan bentang geografis yang luas. TIK berfungsi sebagai sarana utama untuk menciptakan interkonektivitas antar pulau, wilayah, masyarakat, bahkan antar instansi pemerintah untuk mendukung efisiensi layanan publik. Namun, menurut laporan (OECD, 2001), negara-negara dengan wilayah geografis yang luas dan kondisi geografis menantang, seperti Indonesia, sering menghadapi kendala besar dalam pemerataan infrastruktur TIK. Hal ini diperparah dengan data dari (ITU, 2022), yang menunjukkan bahwa banyak daerah di negara berkembang, termasuk Indonesia, masih tergolong sebagai *underserved* atau bahkan tidak memiliki akses TIK yang memadai, sehingga menciptakan kesenjangan digital yang signifikan di antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Infrastruktur TIK dibutuhkan oleh Negara kepulauan seperti Indonesia dengan tujuan terciptanya interkonektivitas antar pulau, wilayah, masyarakat yang menetap, bahkan antar instansi. Namun masih banyak wilayah yang belum tersentuh infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi.

Mengingat luasnya wilayah Indonesia sebesar 7,9 juta km<sup>2</sup>, terdapat banyak lagi wilayah lainnya yang belum terjamah layanan jaringan telekomunikasi. Selain itu, karena Indonesia adalah kepulauan dengan lebih dari 13.000 pulau, diantaranya berbentuk topografi lembah dan pegunungan, lokasi pedesaan meluas, yang membuat pembangunan jaringan komunikasi dan informasi sulit dan membutuhkan dukungan biaya. Akibatnya, infrastruktur TIK hanya terkonsentrasi di daerah daratan dan perkotaan, yang sebagian besar terletak di pulau Sumatera juga Jawa. Pada akhirnya, digital divide terjadi karena ketidakmerataan infrastruktur ini. Sempelnya, digital divide dapat didefinisikan sebagai perbedaan dalam akses akan penggunaan TIK. Pendapat pakar terkait pengentasan digital divide yaitu Menurut (Tyas, 2015), berarti kesenjangan digital merupakan keadaan dimana terjadi gap antara mereka yang dapat mengakses internet melalui infrastruktur teknologi informasi dengan mereka yang sama sekali tidak terjangkau oleh teknologi tersebut. Adapun maksud dari pernyataan ini yaitu kesenjangan penggunaan infrastruktur teknologi informasi antar manusia satu dengan manusia lain yang mana peristiwa tersebut harus diantisipasi agar kedepannya tidak terjadi

lagi kesenjangan penggunaan infrastruktur teknologi di kalangan masyarakat. Kemudian, menurut (Sandra, 2019), istilah kesenjangan digital terbentuk untuk menggambarkan kesenjangan dalam memahami kemampuan dan akses teknologi, sehingga muncul istilah “mempunyai” sebagai pemilik atau pengguna teknologi dan “tidak mempunyai” yang berarti sebaliknya. Secara umum, dari pendapat para ahli di atas, kesenjangan digital atau digital divide dialami oleh beberapa individu atau kelompok. Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan atau disparitas dalam hal akses, pemanfaatan, dan penguasaan teknologi digital, khususnya internet, infrastruktur digital, dan perangkat teknologi. Ketimpangan ini tidak hanya berdampak pada aspek sosial, tetapi juga memengaruhi peluang ekonomi, pendidikan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan berbasis teknologi.

Konsep kesenjangan digital (*digital divide*) telah banyak dibahas dalam literatur internasional. Menurut (Van Dijk, 2006), kesenjangan digital tidak hanya mencakup akses fisik terhadap teknologi informasi dan komunikasi (TIK), tetapi juga mencakup keterampilan penggunaan dan kemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut secara optimal. Hal ini menciptakan ketimpangan antara individu atau kelompok yang memiliki akses dan kemampuan terhadap TIK dengan mereka yang tidak memilikinya. (Shabeer, 2024) juga menekankan bahwa kesenjangan digital dapat memperdalam disparitas sosial dan ekonomi, terutama di negara-negara berkembang, jika tidak ditangani secara serius. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis untuk memastikan akses merata terhadap infrastruktur, keterampilan, dan teknologi informasi, sehingga setiap lapisan masyarakat dapat memiliki kesempatan yang sama untuk memanfaatkan TIK. Upaya ini penting untuk mendukung inklusi digital dan mengurangi ketimpangan yang ada (Setiawan, 2021).

Kabupaten Sumbawa menghadapi tantangan besar terkait kesenjangan digital akibat kondisi geografis yang meliputi daerah pegunungan dan pedesaan terpencil, yang menghambat akses terhadap infrastruktur TIK. Hal ini menyebabkan kesulitan masyarakat, terutama di desa-desa, dalam mengakses internet dan layanan E-Government (Alviyando & Mardhatillah, 2023). Keterbatasan ini juga diperburuk dengan rendahnya literasi digital, terutama di kalangan usia lanjut. Fenomena ini mempengaruhi efektivitas penerapan E-Government di Sumbawa, sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi kesenjangan digital dan

mencari solusi untuk mengatasi hambatan tersebut agar E-Government dapat berjalan secara inklusif.

Dengan beberapa fenomena diatas, peneliti menemukan adanya dampak yang ditimbulkan oleh digital divide dalam penerapan E-Government di Kabupaten Sumbawa, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait hal ini.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif non-positivistik yang berfokus pada pemahaman fenomena dalam konteks sosial yang dinamis, sebagaimana dijelaskan oleh (Denzin, 2018). Pendekatan ini menekankan fleksibilitas dan keterlibatan langsung peneliti dalam situasi yang diteliti, memungkinkan peneliti untuk menggali pengalaman dan perspektif individu secara mendalam dan holistik. Dalam pendekatan kualitatif non-positivistik, tidak ada pembagian ketat antara data primer dan sekunder, karena peneliti berperan sebagai instrumen utama yang menginterpretasikan dan memberi makna pada data yang diperoleh melalui interaksi langsung dengan partisipan maupun observasi lapangan. Penekanan utama dari metode ini adalah pemahaman mendalam terhadap fenomena yang sedang diteliti, serta pentingnya kontekstualisasi dan refleksi dalam proses analisis data.

Data dikumpulkan melalui wawancara dengan informan terpilih menggunakan purposive sampling, yang memungkinkan peneliti untuk memilih peserta berdasarkan kriteria tertentu, seperti pengetahuan atau pengalaman yang relevan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti terlibat langsung dalam proses pengumpulan data menggunakan instrumen seperti panduan wawancara, catatan lapangan, dan perangkat perekam untuk memastikan data yang diperoleh akurat dan reflektif terhadap realitas yang ada.

Untuk analisis data, penelitian ini mengadopsi pendekatan yang diusulkan oleh Miles, Huberman, dan Saldana (2020), yang melibatkan tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis ini bersifat iteratif, terbuka, dan fleksibel, yang memungkinkan peneliti untuk menyesuaikan analisis berdasarkan temuan yang muncul selama penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai

keterbukaan informasi publik dan kesenjangan digital di Kabupaten Sumbawa, dengan mengembangkan pemahaman berdasarkan pengalaman dan perspektif para partisipan.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), pusat pemerintahan daerahnya terletak di Sumbawa Besar dan kabupaten terletak pada bagian barat dari Pulau Sumbawa. Pembentukan kabupaten ini sesuai dengan penetapan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dasar hukum pembentukan Kabupaten Sumbawa adalah Undang-Undang Nomor 69 tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.



Sumber: dioleh oleh penulis

**Gambar 2. Peta Administrasi Wilayan Kabupaten Sumbawa**

Secara geografis Kabupaten Sumbawa berada pada posisi geografis 116042'–118022' Bujur Timur, 808'– 907' Lintang Selatan, dengan memiliki luas wilayah 11.556,44 Km<sup>2</sup> (32,97% dari luas Provinsi NTB), yang terdiri dari daratan dengan luas 6.643,98 km<sup>2</sup>, dan lautan 4.912,46 km<sup>2</sup>. Kabupaten Sumbawa memiliki 24 Kecamatan diantaranya yaitu Lunyuk, Orong Telu, Alas, Alas Barat, Buer, Utan, Rhee, Batu Lanteh, Sumbawa, Labuhan Badas, Unter Iwes, Moyo Hilir, Moyo Utara, Moyo

Hulu, Ropang, Lenangguar, Lantung, Lape, Lopok, Plampang, Labangka, Maronge, Empang dan Tarano.

### 3.2. Hasil Penelitian

#### 3.2.1 Gambaran Digital Divide di Kabupaten Sumbawa

Penelitian ini mengidentifikasi dan menganalisis kesenjangan digital (digital divide) di Kabupaten Sumbawa berdasarkan teori (Molnár, 2003) yang mencakup tiga dimensi: kesenjangan akses (*access divide*), kesenjangan penggunaan (*usage divide*), dan kualitas penggunaan (*quality of use*). Hasil penelitian disajikan sebagai berikut:

#### 3.2.2 Kesenjangan Akses (*Access Divide*)

Berdasarkan hasil observasi lapangan dan data yang diperoleh dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksandi) Kabupaten Sumbawa, ditemukan bahwa terdapat sejumlah wilayah di Kabupaten Sumbawa yang masih mengalami keterbatasan akses terhadap jaringan internet. Potensi Kabupaten Sumbawa dalam pemanfaatan teknologi informasi untuk promosi pariwisata melalui media sosial seharusnya menjadi fokus utama pemerintah (Mandala, 2024). Kondisi ini terutama terjadi di daerah-daerah yang memiliki tantangan geografis signifikan, seperti daerah pegunungan, wilayah terpencil, dan kawasan kepulauan. Keterbatasan infrastruktur jaringan di wilayah-wilayah ini telah menciptakan zona blankspot atau daerah yang tidak terjangkau oleh sinyal internet maupun telekomunikasi.

**Tabel 1.** Data Wilayah Blankspot di Kabupaten Sumbawa

| No | Kecamatan  | Desa/Dusun                     | Kondisi   | Keterangan           |
|----|------------|--------------------------------|-----------|----------------------|
| 1  | Orong Telu | Desa Mungkin (Dusun Tengkelak) | Blankspot | Geografis Pegunungan |
| 2  | Batulanteh | Desa Tepal (Dusu Pusu)         | Blankspot | Geografis Pegunungan |
| 3  | Maronge    | Desa Labuhan Sanggono          | Blankspot | Daerah Kepulauan     |

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan temuan dilapangan, didapat bahwa 1) Infrastruktur Jaringan yang tidak merata, daerah-daerah blankspot di Kabupaten Sumbawa masih mengalami keterbatasan akses internet yang disebabkan oleh minimnya

pembangunan infrastruktur telekomunikasi. Hal ini dikarenakan infrastruktur jaringan seperti menara *Base Transceiver Station* (BTS) belum tersebar secara merata di seluruh wilayah, terutama di daerah-daerah pedalaman dan kepulauan. Fokus pembangunan jaringan cenderung terkonsentrasi di pusat-pusat kota atau wilayah yang memiliki akses transportasi mudah, sehingga daerah-daerah dengan akses terbatas seperti pegunungan di Kecamatan Orong Telu dan Batulanteh tertinggal dalam pemenuhan akses teknologi. Kondisi ini semakin diperparah oleh biaya pembangunan infrastruktur jaringan yang tinggi, di mana pembangunan menara BTS atau jaringan fiber optik membutuhkan investasi besar dan menghadapi tantangan logistik akibat kondisi geografis yang sulit. 2) Hambatan Geografis, Wilayah-wilayah dengan kondisi geografis yang ekstrem, seperti desa-desa di daerah pegunungan dan kepulauan, menjadi salah satu faktor dominan penyebab terbatasnya akses internet di Kabupaten Sumbawa. Sebagai contoh, Desa Tepal yang terletak di Kecamatan Batulanteh berada di kawasan pegunungan yang sulit dijangkau oleh provider telekomunikasi. Proses pengiriman dan pemasangan perangkat infrastruktur jaringan di wilayah ini membutuhkan waktu lebih lama dan biaya yang lebih besar dibandingkan wilayah dataran rendah. Selain itu, hambatan topografi seperti pegunungan dan lembah sering mengakibatkan gangguan sinyal yang disebabkan oleh adanya halangan fisik terhadap transmisi jaringan telekomunikasi. Situasi serupa juga terjadi di Desa Labuhan Sangoro yang berlokasi di wilayah kepulauan Kecamatan Maronge. Akses ke desa ini mengandalkan sarana transportasi laut yang terbatas, sehingga pembangunan infrastruktur telekomunikasi menjadi lebih sulit untuk dilaksanakan. Akibatnya, penduduk di desa-desa seperti ini harus bergantung pada teknologi komunikasi konvensional yang seringkali memiliki keterbatasan fungsi dan jangkauan. 3) Keterbatasan Ekonomi, selain faktor geografis dan infrastruktur, keterbatasan akses internet juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi masyarakat. Harga perangkat teknologi seperti smartphone dan perangkat penerima sinyal (modem/router) dinilai masih terlalu mahal bagi sebagian besar masyarakat di wilayah pedesaan. Lebih lanjut, biaya langganan internet yang relatif tinggi dibandingkan pendapatan masyarakat setempat menjadi kendala tambahan dalam memperoleh akses terhadap jaringan

internet. Hal ini dikonfirmasi oleh hasil wawancara dengan warga Desa Mungkin, Kecamatan Orong Telu.

*"Kami kesulitan mendapatkan sinyal, bahkan untuk komunikasi dasar seperti telepon sering tidak bisa dilakukan. Paket internet mahal dan hanya bisa digunakan jika pergi ke kota"* - Wawancara dengan warga Desa Mungkin, Kecamatan Orong Telu. Pernyataan ini menggambarkan bahwa masyarakat di wilayah pedesaan Kabupaten Sumbawa menghadapi keterbatasan aksesibilitas fisik maupun keterjangkauan ekonomi terhadap layanan internet. Untuk mendapatkan akses jaringan, sebagian warga harus melakukan perjalanan ke pusat kota terdekat, yang tentunya memerlukan biaya tambahan dan waktu tempuh yang tidak efisien.

Berdasarkan data dan temuan di atas, kondisi kesenjangan akses (*access divide*) di Kabupaten Sumbawa menunjukkan bahwa terdapat ketimpangan yang signifikan dalam penyebaran jaringan telekomunikasi dan internet antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Hal ini dipengaruhi oleh tiga faktor utama yaitu 1). Faktor Infrastruktur: Pembangunan infrastruktur jaringan yang tidak merata mengakibatkan daerah-daerah terpencil seperti pegunungan dan kepulauan menjadi blankspot. 2) Faktor Geografis: Kondisi topografi yang sulit dijangkau menyebabkan hambatan dalam instalasi dan pemeliharaan jaringan telekomunikasi. 3) Faktor Ekonomi: Rendahnya daya beli masyarakat di pedesaan membatasi kemampuan mereka dalam memiliki perangkat teknologi dan membayar layanan internet.

Kondisi ini mengindikasikan bahwa intervensi yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi kesenjangan akses di Kabupaten Sumbawa. Intervensi tersebut meliputi pembangunan infrastruktur jaringan di wilayah blankspot, peningkatan kerjasama dengan penyedia layanan telekomunikasi, serta pemberian subsidi perangkat teknologi dan layanan internet bagi masyarakat berpendapatan rendah. Dengan mengatasi faktor-faktor tersebut, diharapkan pemerataan akses internet dapat mendukung implementasi E-Government di Kabupaten Sumbawa, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

### 3.2.3 Kesenjangan Penggunaan (*Usage Divide*)

Keterbatasan penggunaan teknologi informasi di Kabupaten Sumbawa merupakan salah satu dimensi signifikan dalam *digital divide* yang mempengaruhi produktivitas dan aksesibilitas masyarakat terhadap berbagai layanan berbasis digital. Kesenjangan penggunaan ini tidak hanya disebabkan oleh kurangnya akses fisik terhadap teknologi, tetapi juga dipengaruhi oleh rendahnya tingkat literasi digital, kepemilikan perangkat teknologi yang terbatas, serta faktor demografis seperti usia dan pendidikan. Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian (Diskominfotiksandi) serta observasi langsung di lapangan, berikut adalah beberapa faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya *usage divide* di Kabupaten Sumbawa.

#### 1. Tingkat Pendidikan yang Rendah

Salah satu faktor krusial yang menyebabkan keterbatasan penggunaan teknologi informasi adalah tingkat pendidikan yang rendah, terutama di wilayah pedesaan. Mayoritas masyarakat di daerah ini hanya menyelesaikan pendidikan hingga jenjang sekolah dasar atau menengah pertama. Kondisi ini berdampak langsung pada rendahnya literasi digital, yaitu kemampuan dasar dalam mengoperasikan perangkat teknologi seperti smartphone, komputer, atau perangkat berbasis internet lainnya. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah cenderung mengalami kesulitan dalam memahami cara penggunaan teknologi yang lebih kompleks. Misalnya, untuk mengakses layanan E-Government atau platform pembelajaran online, mereka memerlukan bimbingan tambahan yang belum tersedia secara memadai di tingkat lokal. Hal ini menjadikan pemanfaatan teknologi informasi hanya sebatas komunikasi dasar, seperti panggilan telepon atau pengiriman pesan singkat (SMS).

#### 2. Keterbatasan Kepemilikan Perangkat Elektronik

Selain faktor pendidikan, kepemilikan perangkat elektronik menjadi tantangan serius dalam penggunaan teknologi di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan data yang dihimpun dari Diskominfotiksandi, tercatat bahwa sekitar 70% rumah tangga di wilayah blankspot tidak memiliki perangkat teknologi seperti smartphone, komputer, atau perangkat penerima sinyal internet lainnya. Keterbatasan kepemilikan perangkat ini umumnya dipengaruhi oleh dua faktor

utama, yaitu 1) kondisi ekonomi masyarakat, sebagian besar masyarakat di wilayah pedesaan Kabupaten Sumbawa memiliki pendapatan yang terbatas, sehingga pembelian perangkat elektronik dianggap bukan sebagai prioritas kebutuhan sehari-hari. Biaya untuk membeli perangkat seperti smartphone atau laptop serta langganan internet dianggap terlalu mahal bagi keluarga dengan pendapatan rendah. 2) keterbatasan infrastruktur jaringan, meskipun beberapa keluarga memiliki perangkat elektronik, keberadaan jaringan internet yang tidak stabil di daerah pedesaan menjadikan perangkat tersebut kurang dimanfaatkan secara optimal. Hal ini menciptakan siklus keterbatasan, di mana kepemilikan perangkat yang tidak didukung infrastruktur memadai hanya menjadi barang pasif tanpa manfaat yang signifikan.

### **3. Faktor Demografis: Usia Pengguna**

Aspek demografis, khususnya usia pengguna, turut memengaruhi kesenjangan penggunaan teknologi informasi di Kabupaten Sumbawa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, terlihat adanya perbedaan signifikan dalam penggunaan teknologi antara generasi muda dan kelompok usia yang lebih tua. 1) Generasi di atas 40 tahun: Kelompok ini cenderung mengalami kesulitan dalam mengadopsi teknologi modern karena rendahnya literasi digital dan kurangnya pengalaman dalam menggunakan perangkat berbasis internet. Mereka lebih terbiasa dengan cara-cara tradisional dalam memperoleh informasi, seperti melalui komunikasi lisan, koran cetak, atau pertemuan langsung. 2) Generasi Muda: Sebaliknya, generasi muda lebih akrab dengan teknologi, tetapi pemanfaatan teknologi masih bersifat konsumtif. Mereka cenderung menggunakan perangkat elektronik untuk hiburan, seperti media sosial, bermain game, atau menonton video, dibandingkan untuk aktivitas produktif seperti belajar online, mencari informasi pekerjaan, atau mengikuti pelatihan digital.

### **Contoh Kasus Desa Semamung**

Kasus di Desa Semamung, Kecamatan Batulanteh, memberikan gambaran nyata mengenai keterbatasan penggunaan teknologi informasi. Warga di desa ini mengandalkan ponsel dasar untuk komunikasi, seperti menelepon dan berkirim SMS, sementara akses internet hampir tidak dimanfaatkan karena keterbatasan jaringan dan pengetahuan teknis. Kondisi ini memberikan dampak yang cukup

signifikan bagi anak-anak sekolah di Desa Semamung. Dalam situasi di mana pembelajaran berbasis daring menjadi kebutuhan, anak-anak terpaksa harus melakukan perjalanan jauh ke desa tetangga yang memiliki koneksi internet lebih baik. Hal ini menambah beban waktu, biaya, dan tenaga bagi mereka, serta menghambat perkembangan pendidikan secara merata.

*"Anak-anak harus berjalan 2 kilometer ke desa sebelah untuk mengerjakan tugas sekolah karena tidak ada jaringan di sini,"* ujar Kepala Dusun Desa Semamung ketika diwawancarai.

### **Implikasi dari *Usage Divide***

Kesenjangan dalam penggunaan teknologi informasi di Kabupaten Sumbawa berdampak serius terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, antara lain: 1) terhambatnya pendidikan, Anak-anak yang tinggal di daerah dengan keterbatasan akses perangkat dan literasi digital mengalami kesulitan dalam mengikuti pembelajaran berbasis teknologi. 2) keterbatasan ekonomi, masyarakat tidak dapat memanfaatkan peluang ekonomi berbasis digital, seperti pemasaran produk lokal melalui *e-commerce* atau akses terhadap layanan keuangan digital. 3) minimnya partisipasi dalam E-Government: Rendahnya pemahaman teknologi menghambat masyarakat untuk memanfaatkan layanan administrasi dan informasi publik yang disediakan oleh pemerintah melalui platform digital.

### **3.2.4 Kualitas Penggunaan (*Quality of Use*)**

Selain kesenjangan akses dan penggunaan, permasalahan yang tak kalah signifikan dalam digital divide di Kabupaten Sumbawa adalah rendahnya kualitas pemanfaatan teknologi. Aspek ini menekankan pada sejauh mana teknologi informasi digunakan secara efektif untuk menunjang produktivitas ekonomi, pendidikan, maupun akses terhadap layanan publik digital, seperti E-Government. Namun, penelitian ini menemukan bahwa masyarakat di wilayah pedesaan Kabupaten Sumbawa masih memanfaatkan teknologi sebatas fungsi dasar seperti komunikasi dan hiburan, sementara penggunaan yang bersifat produktif dan strategis masih sangat minim.

## 1. Rendahnya Literasi Digital

Salah satu hambatan utama dalam kualitas pemanfaatan teknologi adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Literasi digital merujuk pada kemampuan individu dalam menggunakan teknologi informasi untuk menemukan, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi secara efektif. Sayangnya, mayoritas masyarakat di Kabupaten Sumbawa, khususnya di pedesaan, hanya menggunakan internet untuk kebutuhan komunikasi dasar seperti menelepon atau mengirim pesan singkat, serta hiburan seperti mengakses media sosial atau menonton video. Berdasarkan data pemanfaatan internet di Desa Labuhan Sangoro, ditemukan pola penggunaan sebagai berikut:

**Tabel 2.** Data pemanfaatan internet di Desa Labuhan Sangoro

| No | Aktivitas  | Presentase (%)                 |
|----|------------|--------------------------------|
| 1  | Orong Telu | Desa Mungkin (Dusun Tengkelak) |
| 2  | Batulanteh | Desa Tepal (Dusu Pusu)         |
| 3  | Maronge    | Desa Labuhan Sanggono          |

Sumber: Diolah oleh penulis

Berdasarkan interpretasi data pada tabel 2 terkait data pemanfaatan internet di Desa Labuhan Sangoro yaitu 1) Komunikasi dan Hiburan Mendominasi, sekitar 80% masyarakat menggunakan internet hanya untuk komunikasi sehari-hari dan konsumsi hiburan. Hal ini menunjukkan bahwa teknologi belum dimanfaatkan secara optimal untuk aktivitas yang lebih strategis seperti pengembangan bisnis online, peningkatan keterampilan melalui platform digital, atau pemanfaatan layanan pemerintah berbasis E-Government. 1) rendahnya aktivitas produktif, hanya 15% yang memanfaatkan internet untuk aktivitas produktif seperti menjalankan bisnis kecil berbasis digital, bekerja jarak jauh, atau mengikuti pelatihan online. Hal ini menunjukkan keterbatasan masyarakat dalam memahami peluang ekonomi yang dapat dihasilkan melalui teknologi. 2) akses informasi publik sangat minim, hanya 5% masyarakat yang memanfaatkan teknologi untuk mengakses informasi publik melalui layanan E-Government seperti situs web resmi pemerintah daerah, aplikasi administrasi online, atau pengumuman kebijakan publik.

## **2. Minimnya Pelatihan Teknis**

Rendahnya kualitas penggunaan teknologi di Kabupaten Sumbawa juga dipengaruhi oleh minimnya pelatihan teknis yang diselenggarakan oleh pemerintah. Hingga saat ini, program peningkatan literasi digital di wilayah pedesaan masih bersifat sporadis dan tidak merata. Kegiatan pelatihan yang ada cenderung terbatas pada penyuluhan dasar tanpa memberikan keterampilan lanjutan yang diperlukan oleh masyarakat untuk memanfaatkan teknologi secara optimal. 1) kekurangan bimbingan teknis, tidak adanya program pelatihan yang berkelanjutan membuat masyarakat, terutama di pedesaan, tidak memiliki pemahaman yang memadai tentang cara menggunakan platform digital. Misalnya, layanan E-Government yang disediakan oleh pemerintah belum dapat diakses secara efektif karena rendahnya kemampuan teknis dalam menavigasi situs web atau aplikasi digital. 2) tidak adanya fasilitator lokal, pemerintah daerah belum melibatkan tenaga fasilitator atau agen literasi digital di desa-desa untuk membantu masyarakat memahami manfaat teknologi dan memberikan pelatihan praktis. Akibatnya, masyarakat masih bergantung pada cara-cara tradisional dalam mencari informasi atau menyelesaikan urusan administrasi.

## **3. Ketidaksesuaian Infrastruktur Teknologi**

Meskipun beberapa wilayah sudah mulai mendapatkan akses jaringan, kualitas layanan internet yang disediakan sering kali tidak optimal. Hal ini disebabkan oleh ketidaksesuaian infrastruktur yang tersedia dengan kebutuhan masyarakat. Gangguan sinyal yang sering terjadi, kecepatan internet yang rendah, serta kapasitas jaringan yang terbatas menjadi penghambat utama dalam memaksimalkan penggunaan teknologi.

### **Contoh Kasus**

Warga di Desa Labangka menyatakan bahwa meskipun mereka sudah memiliki perangkat seperti smartphone, mereka kesulitan mengakses situs-situs resmi pemerintah karena jaringan sering terputus. Selain itu, ketidakmampuan untuk menavigasi platform digital menambah kesulitan dalam memanfaatkan layanan berbasis teknologi.

*"Kami tidak tahu cara menggunakan situs pemerintah. Lebih mudah baca informasi di media sosial atau koran."* - Wawancara dengan warga Desa Labangka

Kondisi ini mempertegas bahwa ketersediaan akses tidak serta merta menjamin pemanfaatan teknologi yang berkualitas. Dibutuhkan dukungan teknis yang mencakup peningkatan *literasi* digital dan perbaikan infrastruktur agar masyarakat dapat memanfaatkan teknologi secara optimal.

#### **4. Dampak Kualitas Penggunaan yang Rendah**

Rendahnya kualitas penggunaan teknologi di Kabupaten Sumbawa memiliki sejumlah dampak negatif, antara lain: 1) Terhambatnya Akses terhadap Layanan Publik, Masyarakat tidak mampu memanfaatkan layanan E-Government yang sebenarnya bertujuan mempermudah akses informasi dan administrasi. Akibatnya, mereka masih bergantung pada prosedur manual yang lebih lambat dan tidak efisien.

- 1) Keterbatasan Peluang Ekonomi: Minimnya pemanfaatan teknologi untuk aktivitas produktif seperti e-commerce atau bisnis online menyebabkan masyarakat kehilangan peluang untuk meningkatkan pendapatan melalui ekonomi digital.
- 2) Kesenjangan dalam Literasi Digital: Masyarakat yang tidak memiliki keterampilan teknis akan semakin tertinggal dalam hal akses informasi, pendidikan, dan layanan kesehatan berbasis teknologi, yang semakin memperlebar kesenjangan digital.

#### **3.2.5 Upaya Pemerintah dalam Mengatasi Digital Divide**

Pemerintah Kabupaten Sumbawa, melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfotiksandi), telah berupaya secara sistematis untuk mengatasi kesenjangan digital (*digital divide*) yang masih menjadi tantangan besar, khususnya di daerah pedesaan dan terpencil. Upaya ini berfokus pada pembangunan infrastruktur jaringan, peningkatan literasi digital, serta kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan penyedia layanan teknologi. Namun, dalam implementasinya, berbagai hambatan masih ditemui, yang mempengaruhi efektivitas dari program-program yang telah dijalankan. Berikut ini

adalah penjabaran komprehensif mengenai upaya pemerintah dan tantangan yang dihadapi dalam mengatasi kesenjangan digital di Kabupaten Sumbawa.

### **1. Pembangunan Infrastruktur Jaringan Internet**

Salah satu langkah utama pemerintah dalam mengatasi digital divide adalah dengan memperluas infrastruktur jaringan telekomunikasi agar akses internet dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata, termasuk di wilayah-wilayah yang selama ini masih terisolasi dari jaringan komunikasi. Upaya ini melibatkan pembangunan fasilitas teknologi yang mencakup: 1) Penambahan Titik-Titik Jaringan di Wilayah Blankspot Pemerintah daerah, melalui koordinasi dengan penyedia layanan telekomunikasi, telah berupaya memperluas jaringan internet di wilayah blankspot, terutama di desa-desa terpencil yang memiliki hambatan geografis. Contohnya, wilayah pegunungan seperti Desa Tepal dan daerah kepulauan seperti Labuhan Sangoro telah menjadi prioritas dalam pengembangan titik-titik jaringan baru. 2) Pemasangan Menara *Base Transceiver Station* (BTS). Untuk meningkatkan konektivitas di daerah sulit dijangkau, pemerintah menggandeng provider telekomunikasi untuk membangun menara BTS di lokasi-lokasi strategis. Pemasangan BTS diharapkan dapat mengatasi kendala geografis yang selama ini menjadi penghambat utama dalam distribusi jaringan internet. Namun, pembangunan infrastruktur ini memerlukan dukungan anggaran yang besar serta kerjasama lintas pihak agar target perluasan jaringan dapat terealisasi dengan efektif.

*“Kami fokus membangun infrastruktur jaringan baru, terutama di wilayah-wilayah blankspot agar seluruh masyarakat memiliki akses yang setara terhadap internet.”* –Kepala Diskominfotiksandi Kabupaten Sumbawa

### **2. Program Literasi Digital untuk Masyarakat Desa**

Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah juga menyadari bahwa ketersediaan akses internet saja tidak cukup jika masyarakat tidak memiliki keterampilan untuk memanfaatkannya secara produktif. Oleh karena itu, program literasi digital menjadi salah satu prioritas dalam upaya mengatasi digital divide. Program ini menyasar kelompok usia produktif di wilayah pedesaan yang masih mengalami keterbatasan dalam pemahaman teknologi informasi. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan meliputi: 1) Pelatihan Penggunaan Teknologi

Dasar: DiskominfoTeksandi menyelenggarakan pelatihan dasar tentang cara mengoperasikan perangkat elektronik seperti smartphone dan komputer, serta pemanfaatan internet untuk kegiatan produktif. Pelatihan ini difokuskan pada penggunaan platform digital untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mengakses informasi publik, layanan administrasi online, serta peluang bisnis berbasis teknologi. 2) Sosialisasi Layanan E-Government: Pemerintah melakukan edukasi kepada masyarakat mengenai manfaat layanan E-Government dan cara mengaksesnya melalui situs web atau aplikasi resmi pemerintah. Program ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan publik berbasis digital.

Namun, efektivitas program literasi digital masih terbatas akibat rendahnya partisipasi masyarakat. Banyak warga, terutama kelompok usia di atas 40 tahun, yang kurang tertarik mengikuti pelatihan karena persepsi bahwa teknologi tidak memiliki relevansi signifikan dalam kehidupan sehari-hari mereka.

*“Kami sudah adakan pelatihan teknologi, tapi masih banyak warga yang enggan ikut karena merasa tidak butuh. Ini jadi tantangan kami untuk terus memberikan pemahaman akan pentingnya teknologi.”* – Petugas DiskominfoTeksandi

### **3. Kolaborasi dengan Pemerintah Pusat dan Pihak Swasta**

Untuk mengatasi keterbatasan sumber daya daerah, Pemerintah Kabupaten Sumbawa juga menjalin kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pihak swasta dalam penyediaan program pendukung, seperti bantuan infrastruktur dan subsidi perangkat teknologi. Upaya yang telah dilakukan meliputi: 1) Program Bantuan Internet Desa, pemerintah daerah mengajukan proposal ke pemerintah pusat untuk mendapatkan program bantuan internet desa, yang bertujuan menyediakan akses Wi-Fi gratis di pusat-pusat aktivitas masyarakat, seperti kantor desa, sekolah, dan fasilitas umum lainnya. 2) Subsidi Perangkat Elektronik: Kolaborasi dengan pemerintah pusat dan lembaga swasta dilakukan untuk memberikan subsidi atau bantuan perangkat teknologi bagi keluarga berpendapatan rendah. Subsidi ini diharapkan dapat meningkatkan kepemilikan perangkat seperti smartphone atau laptop, sehingga akses ke layanan digital dapat lebih merata. 3) Pembangunan Infrastruktur Berbasis Kerjasama: Pemerintah menggandeng provider telekomunikasi untuk berinvestasi dalam pembangunan jaringan di daerah-daerah

yang selama ini kurang menarik secara komersial. Kerjasama ini dilakukan melalui skema pendanaan bersama (co-financing) untuk mengatasi keterbatasan anggaran daerah dan melakukan evaluasi kematangan digital (Syuhada, 2024).

### **Hambatan dalam Upaya Mengatasi Digital Divide**

Meskipun berbagai upaya telah dilakukan, terdapat sejumlah hambatan yang menghambat keberhasilan implementasi program pemerintah dalam mengatasi digital divide di Kabupaten Sumbawa. Hambatan tersebut antara lain: 1) Terbatasnya Anggaran Daerah Pembangunan infrastruktur teknologi, seperti pemasangan menara BTS dan pengembangan jaringan internet, memerlukan investasi besar. Namun, keterbatasan anggaran daerah sering kali menjadi kendala utama dalam merealisasikan program ini secara menyeluruh. 2) Rendahnya Partisipasi Masyarakat Program literasi digital yang diselenggarakan pemerintah belum mendapatkan partisipasi optimal dari masyarakat, terutama kelompok usia yang lebih tua. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran akan pentingnya teknologi dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan ekonomi. 3) Persepsi Masyarakat yang Belum Siap, Sebagian masyarakat masih memiliki persepsi bahwa teknologi informasi tidak memiliki manfaat langsung bagi kehidupan mereka. Sikap apatis ini membuat program-program pelatihan dan sosialisasi sulit mencapai hasil yang diharapkan (Gafar, 2024).

*“Banyak warga merasa teknologi itu hanya untuk anak muda. Mereka belum melihat manfaat nyata dari internet bagi kehidupan sehari-hari.”* – Kepala Desa di Kecamatan Orong Telu

### **Rekomendasi Strategis**

Untuk mengatasi hambatan tersebut dan mempercepat upaya pengentasan *digital divide*, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan antara lain: 1) Optimalisasi Anggaran dan Prioritas Pembangunan: Mengalokasikan anggaran khusus untuk pembangunan infrastruktur jaringan dan kolaborasi yang lebih intensif dengan pemerintah pusat serta investor swasta. 2) Program Literasi Digital Berkelanjutan: Menyelenggarakan pelatihan literasi digital yang berfokus pada manfaat praktis teknologi, seperti bisnis online, akses informasi kesehatan, dan

layanan administrasi publik. 3) Pendekatan Persuasif kepada Masyarakat: Mengubah persepsi masyarakat melalui sosialisasi yang efektif, menunjukkan manfaat nyata teknologi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Dengan pendekatan yang terintegrasi antara pembangunan infrastruktur, peningkatan literasi digital, dan kolaborasi multi-pihak, diharapkan upaya pemerintah dalam mengatasi kesenjangan digital di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari perkembangan teknologi informasi.

#### **4. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, kesenjangan digital di Kabupaten Sumbawa dapat diklasifikasikan ke dalam tiga dimensi utama, yaitu akses, penggunaan, dan kualitas pemanfaatan teknologi informasi. Penyebab utama dari kesenjangan ini adalah ketidakmerataan infrastruktur jaringan, kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta keterbatasan ekonomi yang menghambat kepemilikan perangkat teknologi oleh masyarakat pedesaan. Selain itu, rendahnya tingkat literasi digital dan minimnya pemahaman tentang manfaat teknologi membuat pemanfaatan internet masih bersifat konsumtif, terbatas pada komunikasi dasar dan hiburan, sementara aktivitas produktif seperti e-commerce, pendidikan daring, dan akses layanan E-Government belum optimal. Meskipun Pemerintah Kabupaten Sumbawa melalui Diskominfo telah berupaya mengatasi hambatan ini melalui pembangunan infrastruktur, program literasi digital, dan kolaborasi dengan pemerintah pusat maupun pihak swasta, implementasinya masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi masyarakat, serta persepsi masyarakat yang belum siap terhadap perubahan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan intervensi yang lebih komprehensif, seperti optimalisasi anggaran pembangunan, penyelenggaraan program literasi digital yang berkelanjutan, serta peningkatan sosialisasi manfaat teknologi untuk mendorong partisipasi masyarakat. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerapan E-Government di Kabupaten Sumbawa dapat berjalan secara inklusif, merata, dan efektif, sehingga mampu meningkatkan aksesibilitas layanan publik dan mendorong kemajuan daerah.

## 5. Daftar Pustaka

- Alviyando, F. A., & Mardhatillah, Y. (2023). Upaya Peningkatan Literasi Digital Masyarakat di Kabupaten Tebo. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 5(2), 208–228. <https://doi.org/10.33701/jtkp.v5i2.3779>
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (Eds. ). (2018). *Buku Pegangan Penelitian Kualitatif SAGE (edisi ke-5)*. Los Angeles, CA: Sage.
- Gafar, I. H. H., & Nurrahman, A. (2024). Analisis Penerapan Smart governance di Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. *Jurnal Teknologi Dan Komunikasi Pemerintahan*, 6(1), 22–49.
- Istiani, N., & Islamy, A. (2020). Fikih media sosial di Indonesia (studi analisis falsafah hukum Islam dalam kode etik netizmu Muhammadiyah). *Asy Syar'iyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam*, 5(2), 202–225.
- ITU. (2022). *Measuring Digital Development: Facts and Figures*. ITU, International Telecommunication Union Development Sector, Geneva.
- Kim, D.-H., Wu, Y.-C., & Lin, S.-C. (2018). Heterogeneity in the effects of government size and governance on economic growth. *Economic Modelling*, 68, 205–216. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2017.07.014>
- Mandala, D. R. T. L., & Fahlevvi, M. R. (2024). Pemanfaatan Teknologi Informasi untuk Promosi Pariwisata Melalui Media Sosial di Dinas Pariwisata Kabupaten Ngada. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 6(1), 147–173.
- Molnár, S. (2003). The explanation frame of the digital divide. *BME-UNESCO Information Society Research Institute*.
- Nainggolan, R. R. E. (2024). Analisis Penggunaan Website dan Media Sosial Pemerintah untuk Pelayanan Publik. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 6(1), 1–21.
- OECD. (2001). *OECD Annual Report 2001*. OECD Publishing, Paris. <https://doi.org/10.1787/annrep-2001-en>

- Oktavianoor, R. (2020). Kesenjangan Digital Akibat Kondisi Demografis di Kalangan Masyarakat Rural. *Palimpsest: Jurnal Ilmu Informasi dan Perpustakaan*, 11(1), 9–19. <https://doi.org/10.20473/pjil.v11i1.21888>
- Reisdorf, B., & Zillien, N. (2024). *Digitale Ungleichheit* (hlm. 1–22). Springer Fachmedien Wiesbaden.
- Sam, A. F. (2019). E-Network Society: Komunalitas Warga dalam Konteks Smart City. *Masyarakat Indonesia*, 44(1), 1–14.
- Sandra, S. (2019). *Konsumsi Internet Masyarakat di Desa Anabanua Kecamatan Barru*. Doctoral dissertation, Universitas Fajar.
- Setiawan, I. (2021). Peningkatan Kompetensi Aparatur dalam Pelayanan Pengaduan Berbasis Online di Kelurahan Kota Cimahi. *Civitas Consecratio: Journal of Community Service and Empowerment*, 1(2), 115–128. <https://doi.org/10.33701/cc.v1i2.2026>
- Shabeer, M. G., & Rasul, F. (2024). Aligning innovation and information with development: A comparative analysis of developed and developing nations. *Environment, Development and Sustainability*, 1–15.
- Syuhada, M. H., Basnella, R. ., & Zahraty, W. (2024). Analisis Kematangan Digital Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam Menggunakan Digital Maturity Model 5.0. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 6(1), 125–146.
- Tyas, D. L., Budiyanto, A. D. ., & Santoso, A. (2015). Pengaruh Kekuatan Media Sosial dalam Pengembangan Kesenjangan Digital. *Scientific Journal of Informatics*, 2(2), 147–154.
- Van Dijk, M. P. (2006). *Managing cities in developing countries*.



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/>).